

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETARA ANTANNAS



EDISI XXIII
MEI 2018

**MEDIA
SOSIAL**
DALAM
POLITIK

REVISI UNDANG UNDANG
ANTI TERORISME

MENYIBAK SEJARAH
DAN
MERAJUT PENGEMBANGAN
REMPAH-REMPAH INDONESIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian
Om Swastyastu
Shalom

Memaknai hari besar bisa melalui berbagai cara. Salah satunya dengan mengingat sejarah perjuangan bangsa sendiri yang merupakan perjalanan proses pendewasaan. Akan tetapi, disadari atau tidak, dinamika kehidupan saat ini, yang secara nyata sudah teramat jauh meninggalkan peristiwa-peristiwa penting yang ditancapkan oleh para pendiri bangsa, ternyata kegetiran hidup makin dirasakan oleh rakyat Indonesia, tidak hanya soal ekonomi atau politik saja, kehidupan sosial dan budaya pun terasa menghimpit alam pikiran bangsa ini.

Saat datangnya bulan Mei, akan kita jumpai hari dan tanggal penting yang sering diperingati dengan kegiatan upacara yaitu Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei). Kedua hari besar ini telah berhasil membuat bangsa Indonesia memiliki momentum untuk memperbaiki diri. sudahkah pendidikan kita memiliki arah yang baik? Atau apakah negara ini sudah bangkit?

Dua pertanyaan di atas mungkin akan memiliki seribu jawaban dan seribu alasan dalam menjawabnya, tergantung pada kepentingan dan posisi apa kapasitas menjawabnya. Hidup bukanlah untuk saling menyalahkan. Sebagai sesama anak negeri, sepatutnya bersama-sama memupuk rasa nasionalisme yang sudah merapuh akibat tergerus kuatnya arus zaman. Sangat kental terasa, nasionalisme hanya berupa seremonial belaka tanpa memiliki bentuk nyata yang mampu meningkatkan kualitas bangsa ini sampai pada sel-sel terkecil.

Urut nadi bangsa ini adalah aktifitas dan cara pandang kita. Redaksi Majalah Catra mengajak seluruh pembaca merenung sejenak dan menyingsingkan lengan untuk Indonesia. Jika kita analogikan, anggaphlah semua permasalahan bangsa ini bagaikan kompetisi yang memiliki sistem gugur. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita mengambil sikap untuk lebih serius dalam melakukan sesuatu dan menganggap semua yang kita hadapi adalah sebuah pertandingan final dimana yang menjadi juara pertama pastinya si nomor satu, bukan nomor dua, tiga dan lain sebagainya.

REDAKSI

HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-110 1908 - 2018

Redaksi

MAJALAH CATRA

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

Inspirasi Bulan Ini

OPINI



4 MEDIA SOSIAL DALAM POLITIK



6 REVISI UU ANTI TERORISME



8 HARI KEBANGKITAN NASIONAL (REFLEKSI BANGSA UNTUK TERUS BERKARYA)

TAJUK UTAMA



9 MENYIBAK SEJARAH DAN MERAJUT PENGEMBANGAN REMPAH-REMPAH INDONESIA

KEBIJAKAN PEMERINTAH



14 THR DAN GAJI KE-13

INFO KITA



16 LETJEN TNI DONI MONARDO USULKAN AGAR DIBENTUK LAGI DEWAN KEAMANAN NASIONAL



17 MENYIKAPI UU TERORISME DIPERLUKAN KESERIOUSAN PEMERINTAH DALAM BERDAYAKAN DAN LIBATKAN TNI



18 LETJEN TNI (PURN) AGUS WIDJOJO: "DALAM DEMOKRASI YANG PENTING ADALAH KEABSAHAN"



KEPALA AYAM

Ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapekan bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, sudah shalat Ashar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami, "sudah ayah." Istrinya beranjak dari tempat tidur mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya.

Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskan. Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Suaminya menjawab, "Itulah sebabnya karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak."

Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya ternyata sepotong kepala ayam begitu indah sebagai wujud kasih sayang yang tulus kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Makasih ya ayah atas cinta dan kasih sayangmu." ucap sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir didalam dirinya.

Seringkali kita mengabaikan hal kecil yang dilakukan oleh sang Ayah yang ternyata memiliki makna besar, dan di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan juga tanggungjawab.

Semoga cerita fiksi ini bisa kita ambil hikmahnya, dengan mencintai setulus hati ayah yang telah berkorban untuk anak dan istrinya sekaligus memberikan makna yang lebih bagi kita semua dalam menjalankan ibadah Shaum Ramadhan. Semoga.....

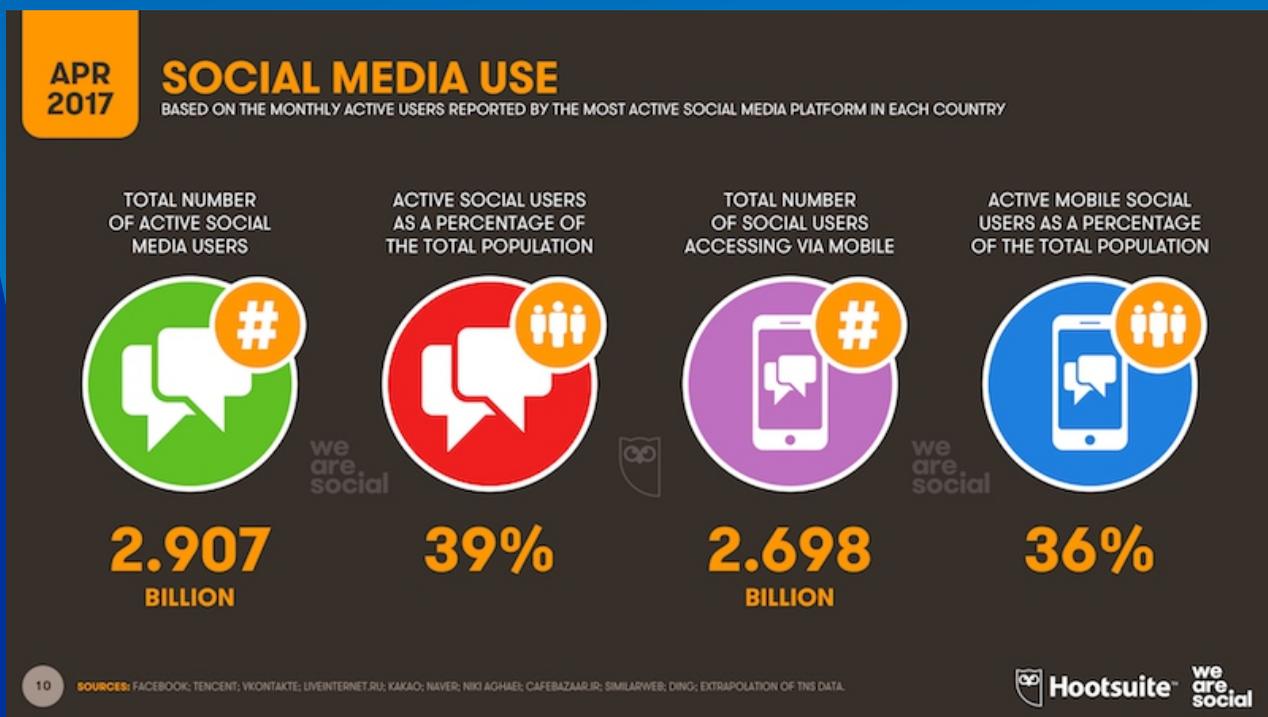
DESI

KEKUATAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK

Di era reformasi telah membuka ruang dimana ekspresi politik rakyat dan wacana yang dibawakannya dapat mewarnai sebuah proses politik. Kita telah menyaksikan sekali lagi bagaimana *appeal* media sosial dalam menggencarkan opini

rakyat terhadap suatu proses politik atau kasus dengan muatan politik yang tinggi.

Di Indonesia, isu-isu sosial dan politik telah banyak mendapat respons melalui media sosial, contohnya sudah banyak, mulai dari berita korupsi, sampai unjuk rasa yang digelar pada saat pilkada DKI Jakarta oleh alumni 212.****





REVISI UNDANG UNDANG ANTI TERORISME

Oleh: Hulman Napitupulu

Peristiwa penyanderaan dan terbunuhnya beberapa anggota Polri di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Mako Brimob Kelapa Dua, Selasa (8/05/2018) lalu, begitu menghentak, mengejutkan sekaligus mengingatkan kita bahwa terorisme masih menjadi ancaman yang serius di negara ini.

Undang Undang (UU) Anti Terorisme yang berlaku (UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) secara historis, diterbitkan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan perkara bom Bali.

Oleh sebab itu, fokus UU Anti Terorisme ini adalah penindakan secara hukum dan cenderung melihat terorisme sebagai tindak pidana terhadap manusia dan harta benda. Dunia terorisme sudah sangat berkembang pesat. Berbagai kejadian di luar maupun di dalam negeri menunjukkan hal itu. Dan, Pemerintah RI merasa perlu memperbaharui UU Anti Terorisme.

Oleh karenanya, pemerintah telah mengajukan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme (RUU Pemberantasan Terorisme). Dalam pembaruan UU Anti Terorisme tersebut, salah satu hal yang menjadi substansi adalah pelibatan atau dilibatkannya TNI dalam praktik pemberantasan terorisme.

Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (28/5/2017) Presiden RI Joko Widodo menginginkan agar unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme, dan keterlibatan TNI

dimasukan ke dalam RUU Anti Terorisme yang hingga kini masih dibahas di DPR RI.

Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sangat masuk akal mengingat bahwa tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yang untuk itu TNI dibekali kemampuan menangkal dan melakukan penindakan terorisme

Terorisme adalah kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan negara, dan penanggannya memang harus komprehensif, melibatkan seluruh aset, kelembagaan atau badan-badan negara terutama yang sesuai dengan kompetensinya. Jangan hanya Melihat terorisme hanya sebagai sebuah kejahatan biasa yang korbannya adalah manusia dan harta benda, atau hanya sebagai gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Lebih dari itu, terorisme akan sangat membahayakan bagi keutuhan dan kedaulatan serta keselamatan bangsa dan negara.

Dalam kejahatan terorisme, korban sesungguhnya bukanlah warga yang kebetulan menjadi korban baik secara fisik maupun mental psikologis. Sebab kejahatan terorisme ditujukan kepada negara sebagai sebuah entitas. Jadi, korbannya adalah negara secara langsung.

Kekhawatiran berbagai pihak bahwa melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme akan berpotensi terjadinya *abuse of power*, berupa tindakan-tindakan kekerasan/penyiksaan oleh aparat karena rendahnya akuntabilitas pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, adalah sangat tidak beralasan.

UU Anti Terorisme ditujukan khusus terhadap para pelaku terorisme (dengan indikasi yang ditentukan secara tegas), justru untuk melindungi warga masyarakat. Dan, akan lebih berbahaya jika pemerintah tidak hadir, lalai atau melakukan pembiaran terjadinya terorisme yang menimbulkan ketakutan, keresahan dan korban jiwa warganegara. Akuntabilitas pengawasan hanyalah soal mekanisme yang akan dengan mudah diatur dalam regulasi yang baik.

Ada tiga substansi utama yang dibahas dalam revisi UU tersebut yaitu melakukan pencegahan semaksimal mungkin untuk menekan aksi terorisme, penindakan melibatkan TNI, dan pelaksanaan rehabilitasi serta deradikalisasi.

Aspek pencegahan yang mampu untuk memonitor, mencegah, menangkal serta menekan aksi terorisme sebelum timbulnya korban, yaitu dengan: 1) Menghormati hak-hak sipil warga negara

dan supremasi hukum; 2) Aspek penindakan yang tegas, terukur, efektif dan efisien serta konsisten dan menunjukkan kemampuan profesionalitas yang tinggi dari semua aparat yang terlibat; dan 3) Aspek rehabilitasi yang menyeluruh baik terhadap harta benda, dan terutama khususnya terhadap korban jiwa yang terdampak; serta 4) tindakan deradikalisasi terhadap para pelaku dan yang berpotensi sebagai pelaku untuk sedapat mungkin dipulihkan sekaligus dalam jangka panjang akan menjadi langkah/upaya preventif.

UU Anti Terorisme yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR-RI diharapkan dapat segera disahkan, dan kehadirannya dapat memenuhi harapan seluruh komponen bangsa serta dapat meningkatkan dan memupuk rasa cinta damai serta rasa cinta tanah air dari segenap warganegara. Semoga...****

POINT PENTING

REVISI UNDANG UNDANG ANTI TERORISME

Definisi Terorisme

Belum ada kesepakatan antara DPR dan Pemerintah

Peran TNI

Disepakati pelibatan TNI dalam UU Anti terorisme untuk mekanismenya diserahkan kepada Presiden melalui Peraturan Presiden

Pencabutan Kewarganegaraan

Disepakati setiap Warga Negara Indonesia yang dijatuhi hukuman pidana terorisme dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pass lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.



Penyadapan

Disepakati penyadapan tetap harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat berdasarkan permohonan secara tertulis dari penyidik atau atasan penyidik

Perpanjangan masa penahanan

Masa penahanan terduga tindak pidana teroris diperpanjang dari 7 x 24 jam menjadi paling lama 120 hari untuk kepentingan penyidikan. dapat diperpanjang selama 60 hari, kemudian dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 20 hari.

Penebaran Kebencian

Disepakati menambahkan kata "dapat" sehingga pasal tersebut berbunyi: "Setiap orang yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".

Penangkapan

Dalam UU Anti Terorisme sebelum revisi, penangkapan baru bisa dilakukan bila sudah terjadi aksi teror, dalam Revisi UU Anti Terorisme penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sumber:

Lembaga Pemerhati Tayangan untuk Masyarakat (LEMHATAMAS)

HARI KEBANGKITAN NASIONAL

Refleksi Bangsa untuk Terus Berkarya

20 MEI 2018



Oleh: Indra Suryaman

Sudah 110 tahun Indonesia melewati masa dimana bangsa ini pernah menegakan sebuah tonggak kebangkitan, manifestasi yang dilakukan oleh sekelompok pribumi yang menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah sebuah bangsa yang harus bersikap jelas terhadap kaum penjajah.

Tonggak itu mungkin bukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, akan tetapi tonggak yang sudah tertancap selama 37 tahun sebelum Indonesia merdeka itu, telah menjadi inspirasi bahwa kita adalah sebuah bangsa dan harus memiliki cita-cita layaknya sebuah bangsa yang merdeka.

Secara jujur, sepatutnya kita bangga dengan apa yang sudah dimulai oleh generasi sebelumnya. apa yang dilakukan oleh para inisiator pergerakan kebangkitan bangsa, sudah seharusnya kita terjemahkan ke dalam bentuk pengabdian bangsa sesuai dengan kondisi zaman. Sementara, makna nasionalisme hendaknya diwujudkan kedalam pola pikir, sikap, dan perilaku kebangsaan yang selaras dengan tuntutan zaman.

Pada dasarnya, setiap bangsa menginginkan keharmonisan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nasionalisme terbangun bukan dari perilaku yang saling menuding, saling menyalahkan, bahkan saling menyingkirkan. Melainkan dari komitmen untuk berbagi dan bersinergi dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Inilah yang dijadikan tolok ukur sejauh mana karsa, cipta dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan yang diidam-idamkan.

Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, suku, budaya, dan agama, kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara terus menerus dan berkesinambungan. Nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh dan berkembang atas dasar komitmen dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak boleh luntur sampai kapanpun.

Karenanya, harapan besar ada di pundak generasi muda yang merupakan penerus bangsa ini di masa depan. Pemuda harus berkarya agar tetap hidup. Tidak hanya hidup secara harafiah dan secara fisik saja, akan tetapi juga eksis dan menghidupi lingkungan sekitarnya. Pemuda itu ibarat api dalam obor yang menyala di tengah kegelapan. Ia menjadi penerang dan penunjuk arah. Tanpa karya, pemuda hanyalah sebuah obor tanpa api di tengah gelap gulita.

Generasi muda harus dipersiapkan untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan generasi lanjut, harus pandai-pandai mempersiapkan generasi mendatang dan memberikan tongkat estafet secara indah untuk melanjutkan perjuangan.

Semua pihak harus memperjuangkan peradaban Indonesia yang sejahtera. Peradaban yang diartikan dengan pemerataan untuk berkembang baik, pemerataan untuk menikmati kualitas hidup yang baik, pemerataan keadilan dan lain sebagainya, namun tetap berdasarkan undang-undang dan konstitusi yang telah ditentukan.

Selamat hari kebangkitan Nasional yang ke 110, **BANGKIT INDONESIA!!!**

MENYIBAK SEJARAH DAN MERAJUT PENGEMBANGAN REMPAH-REMPAH INDONESIA

Oleh: Muhammad Iqbal

Kita harus bersyukur dan pantas berbangga karena hidup di negara yang memiliki sumber daya alam dengan keanekaragaman hayati yang melimpah (*megadiversity*). Indonesia tercatat sebagai negara peringkat kedua (setelah Brazil) di antara 17 negara yang memiliki keanekaragaman hayati (*megadiverse countries*). Sebanyak 5.131.100 keanekaragaman hayati di dunia, sekitar 15,3 persen terdapat di Indonesia, namun kurang dari lima persen yang telah digunakan. Jika dikelola dengan baik maka Indonesia dapat menjadi negara yang “gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja (kekayaan alam yang berlimpah dalam keadaan tenteram)”.

Dengan posisi berada di khatulistiwa yang hanya memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, maka budidaya dan nonbudidaya flora (nabatah) Indonesia dapat berlangsung sepanjang tahun. Satu diantaranya adalah tanaman rempah-rempah yang secara historis menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia.

SEKILAS TENTANG REMPAH-REMPAH

Apakah anda penggemar wisata kuliner,

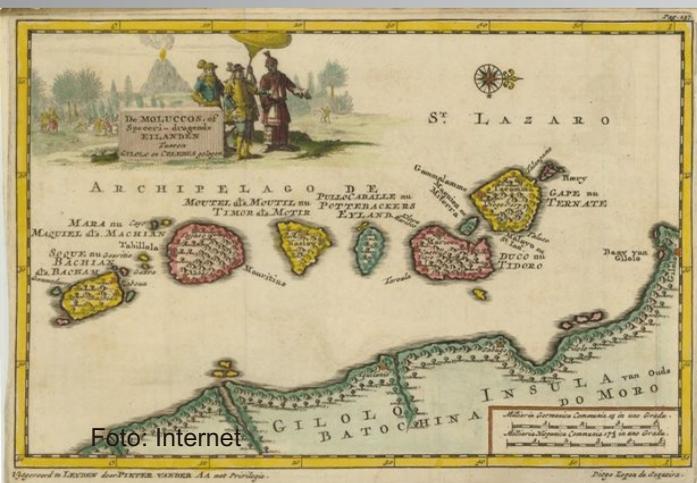
atau hobi relaksasi mengendorkan otot dan urat syaraf, atau pelanggan ramuan tradisional, atau senang dan bergairah dalam penampilan? Jika jawabannya “ya” baik salah satu maupun sebagian atau semuanya, maka secara tidak langsung anda berhubungan dengan rempah-rempah. Kenapa? Karena masakan, salep, jamu dan herbal, serta kosmetika mengandung rempah-rempah.

Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil pada makanan dengan fungsi sebagai pengawet dan perisa (*flavor*). Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang identik seperti tanaman obat, sayuran beraroma, dan buah kering.

Secara garis besar produk turunan rempah-rempah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Bumbu yang digunakan untuk penyedap, pewarna, dan aroma alamiah pada makanan yang bersifat layak konsumsi (*food grade*);
2. Herbal yang berkaitan dengan pengobatan atau pengharum; dan
3. Minyak atsiri yang dihasilkan melalui proses penyulingan (destilasi).

Bahan-bahan yang dipakai untuk bumbu,



ke Indonesia pada waktu itu dikenal dengan istilah 3G (*Gold, Gospel, dan Glory*). *Gold* (mencari rempah-rempah yang berharga seperti emas); *Gospel* (menjalankan tugas suci); dan *Glory* (memperoleh kejayaan).

Begitu fenomenalnya rempah-rempah pada waktu itu, bangsa-bangsa Eropa rela berjibaku mengarungi samudra selama berbulan-bulan perjalanan laut menuju Indonesia khususnya ke Maluku yang terkenal sebagai pulau rempah-rempah (*spices of island*). Demi mendapatkan rempah-rempah, risiko perjalanan jauh dengan nyawa sebagai taruhan menjadi terabaikan, karena keuntungan (pundi-pundi harta) sebagai imbalannya.

Demi mendapatkan rempah-rempah, perjuangan dan pengorbanan bangsa-bangsa Eropa tidak hanya berhubungan dengan ekspedisi perjalanan semata tetapi menjadi persaingan yang berujung pada peperangan. Dua imperium yaitu Inggris dan Belanda berperang mulai tahun 1652 demi memperebutkan rempah-rempah, khususnya pala (*myristica fragrans atau nutmeg*).

Kala itu, sentra produksi rempah-rempah utamanya pala adalah Kepulauan Banda yang terdiri dari 10 gugusan pulau vulkanis. Pulau-pulau tersebut dikuasai oleh Belanda, kecuali Pulau Run yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Perang antara Inggris dengan Belanda berakhir melalui kesepakatan Perjanjian Breda pada tahun 1667. Isi kesepakatannya yaitu Pulau Run diserahkan kepada Belanda sedangkan Inggris mendapatkan Pulau Manhattan atau Nieuw Amsterdam yang sekarang dikenal sebagai New York City di Amerika Serikat

Gambaran saat ini New York City berubah menjadi kota metropolitan yang terkenal seantero dunia dan Pulau Run yang relatif tidak berubah atau tertinggal jauh, itu cerita lain. Tetapi cerita masa lalu tentang Pulau Run adalah sebuah ntokah representasi kejayaan rempah-rempah Indonesia sebagai emas hijau (*green gold*) yang menjadi lumbung penghasilan Belanda.

Belanda menjadi negara adidaya, terutama melalui kongsi dagang atau perusahaan "Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)" yang resmi berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan didirikannya VOC antara lain untuk: (1) menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda; (2) memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur; (3) menyaingi para pedagang asing; dan (4) menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia.

VOC menguasai perdagangan yang mendapat keistimewaan berupa hak "octroi" dari Kerajaan Belanda. Eksistensi VOC melebihi dari apa yang semestinya dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu berupa hak untuk: (1) memerintah di negara jajahan; (2) memonopoli perdagangan;

Herbal, dan minyak atsiri dapat berasal dari: (1) biji dan buah (pala, vanili, dan lain-lain); (2) bunga dan kuncup (cengkeh, kenanga, dan lain-lain); (3) daun dan batang (nilam, pandan, dan lain-lain); (3) akar dan rimpang atau umbi (kunyit, jahe, dan lain-lain); dan (4) kulit, kayu, dan resin atau getah (kayu manis, kemenyan, dan lain-lain).

Khusus untuk minyak atsiri, skala penggunaannya lebih luas dari pada bumbu dan herbal. Minyak atsiri bisa ditujukan untuk: (1) industri aroma (kuliner, rokok, dan lain-lain); (2) industri kosmetika (parfum, sabun, dan lain-lain); (3) industri farmasi (antivirus, antimikroba, antiparasit, anti jamur, dan lain-lain); dan (4) industri lain (kertas, pembersih, pelumas, plastik, dan lain-lain).

Dengan demikian, rempah-rempah memiliki multi fungsi bagi kehidupan manusia. Beberapa diantaranya terkait dengan bidang-bidang berikut:

- 1 Pangan (pencita rasa, pengawet, anti oksidan, pewarna, minuman instan, dan pangan fungsional atau pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasarnya);
- 2 Farmakologi (berhubungan dengan obat-obatan);
- 3 Kosmetika (pasta gigi, *lotion*/pelembab dan lain-lain);
- 4 Pertanian (insektisida, pestisida dan lain-lain);
- 5 Bahan kimia (pernis, terpentin dan lain-lain);
- 6 Lain-lain (campuran rokok kretek dan lain-lain).

Secara historis, bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah adalah dari Arab dan Tiongkok, yaitu pada masa Kerajaan Sriwijaya (sekitar abad ke 7-10). Kemudian pada periode berikutnya datang bangsa Eropa (Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda) yang selanjutnya menjadikan Indonesia sebagai wilayah jajahan (kolonialisme) selama berabad-abad khususnya oleh Belanda.

Filosofi yang diusung bangsa-bangsa Eropa

(3) mencetak mata uang; (4) memiliki angkatan perang; (5) mengumumkan perang; dan (6) mengadakan perjanjian.

Pada era kejayaannya, VOC menjelma menjadi perusahaan raksasa multinasional paling kaya dalam sejarah dan tercatat sebagai perusahaan yang pertama kali menerbitkan saham di dunia dengan nilai aset sekitar 78 juta gulden (US\$ 7,9 triliun). Jika dibandingkan nilai aset tersebut kira-kira setara dengan gabungan aset 20 perusahaan papan atas di era modern yaitu Apple, Amazon, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, Google, Microsoft, Tencent, Wells Fargo, dan lain-lain.

Atau, setara dengan gabungan Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang dan Jerman. Bahkan, lebih tinggi dari pada cadangan devisa negaraterbesar di dunia saat ini, yaitu Tiongkok dengan nilai sekitar US\$ 3,23 triliun.

Selama hampir dua abad (200 ratus tahun) VOC menjelma menjadi perusahaan terkuat dan terkaya di dunia. Diperkirakan sekitar tiga perempat muatan kargo dunia kala itu dikelola oleh VOC. Perusahaan ini mengalami perkembangan pesat dengan ragam bisnis (konglomerasi) meliputi konstruksi, gula, tekstil, tembakau, kaca, penyulingan, dan lain-lain.

Melalui praktik monopoli, VOC dapat meraup keuntungan hingga lebih dari 400 persen. Secara analog, dengan sebakul nasi dapat ditukar (barter) dengan perak. Di samping itu, dengan keuntungan yang dihasilkan VOC, Belanda memasuki masa keemasan (*golden age*) yang melahirkan manusia-manusia genius, misalnya di bidang mikrobiologi seperti Antonie van Leeuwenhoek, Descartes, Rembrandt, dan Vermeer.

VOC tidak hanya memainkan peran kunci dalam sejarah negeri Belanda sendiri, tetapi sekaligus melibatkan negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan Spanyol di Eropa. Selain itu, juga sejumlah kerajaan, kesultanan, dan kekaisaran di sepanjang pantai Asia hingga ke Tiongkok dan Jepang, serta sebagian wilayah pesisir India, Semenanjung Malaya, dan wilayah yang saat ini dikenal sebagai Indonesia.

Lantas, dari mana asal muasal kekayaan VOC tersebut diperoleh? Jawabannya adalah dari rempah-rempah! Bukan dari tulip sebagai ikon yang sejatinya juga bukan bunga asli negeri Belanda sendiri, melainkan dari Turki. Namun, tidak ada yang sempurna dan langgeng di dunia ini. VOC pada akhirnya mengalami keruntuhan, dan pada tanggal 31 Desember 1799 perusahaan tersebut dibubarkan.

Alasan utama pembubaran VOC adalah karena defisit keuangan akibat praktik korupsi serta besarnya biaya untuk menghentikan perlawanan di wilayah koloni. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh tekanan politik terhadap sistem yang diterapkan VOC di wilayah koloni seiring berkembangnya liberalisme. Konsekuensinya, singkatan VOC bahkan kemudian diplesetkan menjadi "Vergaan Onder Corruptie" (hancur karena korupsi).

Kata-kata bijak "... ambil yang baik, buang yang buruk, dan ciptakan yang baru" akan lebih mengena dalam rangka mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia. Praktik VOC sudah tidak sesuai lagi (*out of date*) dan bahkan bertentangan dengan prinsip humanisme, sehingga



Foto: Internet

diperlukan cara atau metode lain yang lebih elegan seraya meingkatkan persaingan di tataran global.

PELUANG PENGEMBANGAN REMPAH-REMPAH

Tidak dapat dipungkiri bahwa rempah-rempah adalah komoditas kebanggaan Indonesia. Beberapa negara lain yang kemudian menjadi produsen rempah-rempah terkenal seperti cengkeh di Zanzibar, Madagaskar, India, Pakistan, dan Sri Lanka karena bibitnya berasal dari Indonesia. Saat ini Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 7.000 jenis tanaman rempah-rempah yang sebagian besar belum dibudidayakan (tumbuh liar di alam bebas). Hanya sebagian kecil saja (4%) yang telah dibudidayakan.

Sampai dewasa ini rempah-rempah masih menjadi komoditas strategis di pasar internasional. Nilai ekspor komoditas rempah-rempah Indonesia pada tahun 2017 tercatat sekitar USD 1,8 miliar. Secara global, nilai pasar rempah-rempah internasional diprediksi mencapai US\$ 30,4 miliar pada tahun 2023, atau tumbuh sebesar 6 persen

pertahun.

Secara umum, ada empat komoditas rempah-rempah nasional yang menjadi primadona di pasar internasional, kendati pangsa pasar (*market share*) Indonesia tidak menduduki peringkat nomor satu. Pertama, komoditas lada Indonesia menempati peringkat keempat dengan pangsa pasar 9,7 persen (di bawah Viet Nam, India, dan Tiongkok). Kedua, komoditas cengkeh Indonesia berada pada urutan ketiga dengan pangsa pasar 10,5 persen, atau di bawah Madagaskar dan Singapura. Ketiga, kayu manis Indonesia menduduki posisi kedua dengan pangsa pasar 19,4 persen (setelah Sri Lanka). Keempat, komoditas pala Indonesia di posisi ketiga dengan pangsa pasar 16 persen, atau di bawah Guatemala dan India.

Secara khusus, berikut disajikan harga beberapa jenis komoditas rempah-rempah Indonesia di pasar dalam dan luar negeri pada tahun 2017 (tabel).

contoh minyak cengkeh, harganya di pasar dalam negeri mencapai Rp 150.000 per kilogram sedangkan harga bahan bakunya (daun cengkeh) hanya Rp 2.000 per kilogram.

Hasil penyulingan 37 kilogram daun cengkeh dapat menghasilkan 1 kilogram minyak cengkeh. Contoh lainnya, harga parfum Hermès 24 Faubourg adalah sekitar US\$ 1.500 atau lebih kurang Rp 18 juta per 30 mililiter. Bahan baku parfum tersebut adalah rempah-rempah diantaranya cendana, nilam, dan vanili. Itulah sekelumit data tentang harga rempah-rempah yang cukup menggiurkan, sehingga dapat memotivasi banyak orang untuk menggeluti bisnis komoditas ini.

Namun karena relatif kurangnya perhatian baik di hulu (budidaya) maupun di hilir (pengolahan), maka eksistensi rempah-rempah nasional seakan-akan kehilangan peluang (*missed opportunities*).

Sebagaimana sejarah telah mencatat dan membuktikan, pengembangan komoditas

NO.	JENIS	HARGA (RP/KG)	
		DALAM NEGERI	LUAR NEGERI
1.	Cengkeh	107.000	600.000
2.	Jahe	14.500	690.000
3.	Jinten	10.500	815.000
4.	Kapulaga	47.000	430.000
5.	Kayu Manis	35.000	1.120.000
6.	Kunyit	45.000	900.000
7.	Pala	170.000	1.140.000

Sumber: luxury-insider.com dan tribunnews.com, 2017

Daftar harga di atas dapat bervariasi menurut dimensi ruang (jenis, bentuk, dan kualitas produk), waktu (harian, bulanan, tahunan), dan tempat (negara produsen dan konsumen). Jenis rempah-rempah termahal di dunia adalah *safron* (kuma-kuma) dengan harga fantastis (Rp 146,58 juta/kg), atau melebihi harga emas Rp 1,8 juta per mayang (3,22 gram). Berikutnya vanili yang harganya dapat mencapai Rp 92,59 juta per kilogram.

Bagi masyarakat Madagaskar, sebagai contoh, vanili dianggap sebagai komoditas pencetak uang yang akhirnya disebut sebagai “green gold” atau emas hijau. Minyak atsiri, sebagai

rempah-rempah menjadi penting dilakukan yaitu dengan cara membangun dan membesarkan (*branding*) guna meningkatkan kekuatan (*brand power*) di tataran global.

Selain itu, rempah-rempah Indonesia sudah selayaknya didaftarkan sebagai “the Unique Selling Proposition (USP)” atau produk spesial di *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Indonesia seyogianya mampu mengalahkan beberapa negara eksportir komoditas rempah-rempah seperti India, Guatemala, Madagaskar, Tiongkok, Sri Lanka, dan Viet Nam, bahkan Singapura yang notabene bukan negara produsen rempah-rempah.



Pangdam XVI/Pattimura (sekarang Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo) menginisiasi program emas hijau di Maluku

ramah lingkungan sehingga lebih berdaya saing di pangsa pasar internasional.

Kalau tidak sekarang, kapan lagi... jika bukan kita, siapa lagi... dan tentunya harus berdasarkan gagasan (*idea*) dengan melibatkan para *stakeholders* terkait.

Namun perlu disadari, bahwa gagasan tanpa kekuatan atau kekuasaan akan lumpuh dan sebaliknya kekuatan atau kekuasaan tanpa gagasan menjadi hampa. Gagasan dalam hal ini adalah menyangkut kreativitas, sedangkan kekuatan dan kekuasaan berhubungan dengan unsur teknis dan elemen nonteknis. Tidak ada kata

terlambat untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Pepatah Spanyol yang menyatakan bahwa “..... apa yang dilakukan orang bodoh di saat akhir, dilakukan orang pintar di saat awal” patut dijadikan salah satu motivasi untuk menyibak sekaligus mengembalikan kejayaan sejarah dan merajut pengembangan komoditas rempah-rempah Indonesia. Semoga...!****

A k h i r n y a , mengingat besarnya potensi dan dan peluang, maka implementasi pengembangan rempah-rempah Indonesia menjadi suatu keniscayaan yang harus diwujudkan secara terencana dan berkelanjutan. Inisiasi yang telah dilakukan oleh Pangdam XVI/Pattimura (sekarang Sesjen Wantannas, Letjen TNI Doni Monardo) dalam program emas hijau, dimana salah satunya adalah tanam rempah-rempah yang ada di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara, patut dijadikan acuan berharga untuk diimplementasikan pada lokasi setempat serta direplikasikan di daerah lain sesuai dengan karakteristik agroekosistem dan kesesuaian lahan serta jenis tanaman rempah-rempah khas masing-masing daerah.

Dengan kata lain, program emas hijau dapat dijadikan embrio atau pilot proyek untuk dikembangkan (*scale-up*) mulai dari skala kecil hingga akhirnya diimplementasikan secara masif dan terintegrasi dengan dampak konkret. Apalagi kalau diiringi dengan sistem organik yang



Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo bersama tokoh-tokoh Maluku dalam sebuah acara membahas program emas hijau di Maluku



THR DAN GAJI KE-13

Oleh: Desi

Rabu (23/05/2018), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri.

PP dimaksud adalah PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

Dalam PP ini disebutkan, gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas bagi Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

THR yang dibayarkan tahun ini tidak hanya sebesar gaji pokok saja, melainkan juga ditambah tunjangan keluarga sekaligus tunjangan kerja. Dengan demikian, PNS yang akan mendapat THR nanti hampir sama seperti *take home pay*. Sementara, gaji ke-13 sebesar satu kali gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain. pemberian gaji/pensiun/tunjangan ke-13 itu ditujukan dalam rangka menghadapi tahun ajaran baru anak sekolah.

“Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 ayat (5) PP tersebut seperti dilansir situs Sekretariat Kabinet, Kamis (24/5)

Selain itu, penghasilan sebagaimana dimaksud dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. “Pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juli,” bunyi Pasal 4 ayat (1) PP ini.

Pasal 8 PP menegaskan, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi: a. Pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat: 1. menteri; dan 2. pejabat pimpinan tinggi; b. Wakil Menteri atau jabatan setingkat wakil menteri; c. Staf Khusus di lingkungan kementerian; d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Hakim Ad Hoc; dan f. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, pada tanggal yang sama Presiden Jokowi telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI,

dan anggota Polri.

PP dimaksud adalah PP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. "PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018," bunyi Pasal 2 ayat(1) PP ini.

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, menurut PP ini, diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. "Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018, yang telah diundangkan.

Dikumpulkan dari berbagai sumber, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan kebijakan pemberian THR yang dikeluarkan pemerintah tahun 2018 ini, berbagai tuduhan juga dialamatkan ke pemerintah diantaranya bahwa kebijakan ini sangat politis dan berkaitan dengan tahun 2019 sebagai tahun politik, akan tetapi Menteri keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan aturan tentang THR yang dikemas

dalam PP Nomor 19 Tahun 2018 itu merupakan turunan dari UU APBN 2018 yang dirancang, dibahas, dan disepakati pemerintah bersama dengan Dewan.

Bantahan serupa juga dikemukakan menteri PAN dan RB Asman Abnur, dan kebijakan itu murni didasarkan pada kajian dan evaluasi mendalam. MenPAN-RB berpendapat bahwa melihat di dua dan tiga tahun belakangan ini, kinerja ASN itu luar biasa. Peningkatan akuntabilitas dipersentasikan dalam nilai LAKIP, hasil evaluasi meningkat. Jadi wajar kalau kita beri apresiasi.

THR dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI-POLRI, sesungguhnya merupakan kebijakan yang menjadi wilayah eksekutif, tentu setiap kebijakan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. terlepas dari banyaknya pendapat tentang kebijakan ini sesungguhnya ada hal yang lebih mendasar yang seharusnya kita lihat dari kebijakan ini, bahwa pemerintah sangat memiliki perhatian terhadap aparaturnya, sementara bagi aparatur negara, kebijakan ini tentu memiliki konsekuensi sosial yang tinggi. sudah saatnya hal ini juga bisa dijadikan momentum meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri. dimasa yang akan datang. ***



Personil Setjen Wantannas mengikuti arahan dari Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo terkait pemberian THR dan Gaji ke-13 pada acara Jam Pimpinan



LETJEN TNI DONI MONARDO USULKAN AGAR DIBENTUK LAGI DEWAN KEAMANAN NASIONAL

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Doni Monardo bersama seluruh Deputi, Staf Ahli, dan kepala Biro bertemu dengan Kepala Staf Presiden TNI (Purn) Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha Jalan Veteran No. 16 Jakarta Pusat, Senin (28/05/2018).

Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain usulan Sesjen Wantannas terkait mekanisme kerja antara Wantannas dan Kantor Presiden, Undang-Undang terorisme yang baru saja disahkan serta pembentukan kembali Dewan Keamanan Nasional dalam menjaga stabilitas negara.

Doni Monardo mengusulkan agar pemerintah membentuk sebuah Instrumen yang terintegrasi dibawah satu kesatuan komando untuk mencegah paham-paham radikal yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan penanaman rasa cinta tanah air, usulan Doni Monardo agar Undang Undang tentang pembinaan kepramukaan kembali diubah.

Hal ini bukan tanpa alasan. Kegiatan pramuka selama ini dinilai sangat bagus untuk

menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini dan terbukti mampu mencegah merasuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda.

Mengenai usulan pembentukan kembali Dewan Keamanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menilai saat ini memang perlu didukung agar dapat terwujud. Menurutnya, harus ada yang menentukan mekanisme seperti apa yang diperlukan kaitannya dengan peralihan tanggungjawab dari kepolisian kepada TNI. Hal ini perlu dilakukan jika timbul adanya spektrum ancaman yang ingin merongrong kedaulatan NKRI. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional sendiri sudah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Turki, dan Prancis.

Harapan Moeldoko, Setjen Wantannas mampu menangkap isu-isu strategis yang dapat dilaporkan kepada Presiden dan bersama-sama mencari solusinya. Ia mengakui saat ini KSP kewalahan dengan banyaknya tugas dari Presiden sehingga perlu adanya *sharing* pekerjaan dengan Wantannas. Pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu, diakhiri dengan foto bersama, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Mayjen TNI Doni Monardo. ****(yr)



MENYIKAPI UU TERORISME DIPERLUKAN KESERiusAN PEMERINTAH DALAM BERDAYAKAN DAN LIBATKAN TNI

Senin (28/05/2018), bertempat di ruang kerja pribadi Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo diadakan pertemuan dengan mantan Sekretaris Kabinet era Persiden Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2017 Andi Widjajanto. Maksud kedatangan Kelompok Kerja Bidang Politik dan Keamanan (Kelompok Kerja P8) ini, untuk meninjau sampai sejauh mana kedalaman pelaksanaan Nawacita baik dipandang dari sisi luar negeri, hak asasi manusia maupun intelijen. Kunjungan ini juga dikaitkan dengan disahkannya Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pidana Terorisme (UU Terorisme) pada Jumat (25/05/2018) oleh DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Wijayanto didampingi oleh 5 orang pejabat yang salah satunya berada dibawah naungan Kantor Staf Presiden (KSP) yaitu *Deputi V* Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM – Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardan dan Ketua Kelompok Kerja P8 sekaligus pakar politik dan kemandirian internasional Edi Prasetyono.

Dalam perbincangan dengan Doni Monardo, Edi Prasetyono mengatakan, bahwa pemerintah harus serius dalam memberdayakan dan melibatkan anggota TNI. “Terkait dengan disahkannya UU tersebut, artinya pemerintah harus *concern* terhadap pelibatan TNI. Maksudnya adalah titik dimana TNI memang diperlukan keterlibatannya. Pembuatan dasar hukumnya harus

jelas, mengandung *point-point* penting yang terkait dengan kapan atau dalam situasi apa, bagaimana, dan berapa besar kekuatan TNI akan digunakan untuk menanggulangi aksi terorisme, serta siapa yang membuat keputusan politik untuk menggunakan kekuatan TNI,” jelas Edi.

Namun perlu diingat, lanjut Edi, pelibatan TNI tetap bertumpu pada UU TNI. Peraturan Presiden yang akan disiapkan untuk itu tetap mempersyaratkan persetujuan DPR. Koordinasi tetap berada di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Entah seperti apa Peraturan Presiden yang kemudian hari akan disusun – apakah akan secara eksplisit mengatur tentang alih kodal (jika pelibatan itu merupakan *mission-type order*) atau sekedar penguatan terhadap Polri dan/atau pelaksana lainnya.

Kategori tugas TNI untuk melaksanakan *Military Operations Other Than War* (MOOTW), seperti diatur dalam pasal 7 ayat 2.b UU TNI, tidak seluruhnya *fit-in* untuk kebutuhan itu, baik karena spesifikasi tugas Kementerian dan Lembaga maupun karakter dan unsur kemampuan TNI sendiri, khususnya terkait dengan fungsi teritorial dan fungsi intelijen TNI. Mengenai keterlibatan, Edi berpendapat, bahwasanya setiap instrument komponen bangsa harus melibatkan diri, tetapi tetap ada kejelasan siapa berbuat apa.

Pertemuan yang memakan waktu sekitar 2 jam itu, nampak Sesjen Wantannas didampingi oleh para Deputi, Staf Ahli dan Kepala Biro.****(dfn)



**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo:
“Dalam demokrasi yang penting adalah keabsahan”**

Selasa (15/05/2018) Setjen Wantannas menyelenggarakan forum *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan dipimpin langsung oleh Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo. FGD berlangsung dengan khidmat bertempat di ruang Situation Room Lantai 5 dengan dihadiri oleh pejabat Eselon I dan II di lingkungan unit Kedepuitan dan Staf Ahli Setjen Wantannas.

Sebagai pembuka, Doni Monardo memperkenalkan para pendampingnya yang dilanjutkan dengan sambutan sekaligus paparan yang disampaikan langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Agus Widjojo. Penyelenggaraan FGD kali ini merupakan kelanjutan dari FGD yang telah dilaksanakan Rabu, (11/04) lalu di tempat yang sama. Namun, pada FGD hari itu, Lemhannas RI menunjuk Tenaga Ahli Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Sosial Budaya Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta. S.IP, M.Sc sebagai perwakilannya.

Agus Widjojo dalam paparannya menyampaikan, bahwa komunikasi teramat penting. “Saya selalu merindukan adanya komunikasi, karena dalam masa transisi seperti ini, komunikasilah yang lebih diperlukan dan amat penting,” kata Agus. Menurutnya, dalam masa transisi simultan ini, sedikitnya ada 5 transisi yaitu:

1 Transisi demokrasi: tolak ukurnya adalah

pernyataan panelis bahwa demokrasi dinyatakan bisa dihitung bila sudah melalui masa transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Indikator keberhasilannya adalah apabila semua orang percaya, bahwa cara-cara untuk menyelesaikan perbedaan adalah berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi. Sebaliknya, selama anda percaya bahwa dalam menyelesaikan perbedaan tidak melalui kaidah demokrasi, dapat diartikan demokrasi belum merupakan ironi pendidikan dan pembinaan mental. Sama saja kita belum melampaui masa transisi demokrasi;

- 2 Kondisi bangsa Indonesia yang terlalu lama berada di bawah Politik Otoritarianisme menuju berdemokrasi, tentunya memerlukan penyesuaian-penyesuaian dari perilaku bangsa itu sendiri;
- 3 Transisi mundur: disebabkan oleh lamanya rakyat Indonesia berada dalam tekanan, dan memang merupakan kultur tradisional bangsa Indonesia. Kultur kita adalah kultur Paternalistik sehingga cocok untuk tatanan-tatanan tertentu, sedangkan untuk tatanan-tatanan yang lain perlu penyesuaian;
- 4 Transisi Revolusi Teknologi yang katanya akan melahirkan revolusi industri; dan
- 5 Transisi Generasi yang membuat setiap orang menjadi individu-individu yang sibuk dengan dunianya sendiri. Hal ini sangat berpengaruh

dan menentukan bagaimana cara kita hidup bersama. Oleh sebab itu, perlu banyak penyesuaian, karena dengan terciptanya pengalaman yang berbeda pada masing-masing individu, terkadang membuat individu tersebut mempunyai kerangka tersendiri dalam pemikirannya. Apabila hal ini tidak dikomunikasikan, maka masing-masing individu akan merasa kerangka yang ia miliki merupakan satu-satunya kerangka berpikir dan dia akan maju terus dengan kerangka itu, selanjutnya dapat dipastikan akan bertabrakan karena setiap individu merasa kerangka berpikir yang ia miliki adalah satu-satunya. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi menjadi teramat penting. Jika komunikasi tidak dilakukan, dapat menyebabkan perbedaan kerangka berpikir akan tersimpan dan tertimbun terlama, yang pada akhirnya memicu berbagai konflik.

Masih soal demokrasi, Agus Widjojo mempunyai pendapat sendiri akan hal itu. "Di dalam demokrasi, kita tidak mengukur sebuah kebijakan itu salah atau benar, dan kita selalu ingin memilih mana yang benar. Akan Tetapi, dalam demokrasi yang penting adalah keabsahan. Selalu mempertanyakan apakah kebijakan ini keluar dari kewenangan yang benar. Jadi, ukurannya adalah konstitusionalitas legalitas. dan orang yang berbicara konstitusionalitas harus paham apa itu sistem nasional dan sistem politik," jelas Agus.

Menanggapi adanya pertanyaan seputar keberadaan TNI yang tidak disejajarkan dengan Polri atau Administrasi Pemerintahan Daerah, Agus

Widjojo pun menambahkan, bahwa keberadaan organisasi TNI tidak mengikuti administrasi pembagian sebagaimana dilakukan Pemerintah Daerah, karena tugas TNI adalah pertahanan.

Pertahanan disini mengandung makna TNI harus siap menghadapi ancaman militer dari luar negeri. Sementara tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara yaitu tegaknya pemerintah dan menjaga integritas keutuhan wilayah nasional. Kedua hal ini jelas menggambarkan sebuah kesatuan yang terintegrasi satu sama lain.

Pada sisi lain, peran konstitusional TNI yang sifatnya pertahanan yaitu *international defence* (pertahanan eksternal). Karena sifatnya eksternal, maka menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Perlu diketahui, dimanapun kesatuan TNI berada, kewenangannya mutlak milik presiden dan tidak diberikan pada Kepala Daerah.

Jika dilihat dari sifatnya, pertahanan itu mencakup seluruh wilayah atau nasional. Hal ini dapat dicontohkan, apabila ada tentara asing merasuki salah satu wilayah Indonesia, yang kalah bukan hanya wilayah tersebut, melainkan secara nasional atau seluruh wilayah juga kalah.

Jadi, semua yang bersifat pertahanan sama artinya dengan nasional dan tanggung jawabnya ada pada Pemerintah Pusat. Ada sedikit perbedaan dengan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Fungsi dan tanggung jawab Kamtibmas terletak pada kebijakan Pemerintah Daerah. Ciri khusus dari Kamtibmas adalah masing-masing lokalitas atau wilayah berbeda satu sama lain, artinya tidak mungkin dikelola secara terpusat. ****(dfn)



Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo (kanan), Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (tengah), dan Deputi Bid. Polstra Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus S, MM, MH (kiri)

PENTINGNYA JAGA KEBERSIHAN SEBAGAI BAGIAN DARI IMAN

Bulan Suci Ramadan 1439 H dirasakan begitu bersemangat oleh seluruh personil di lingkungan Setjen Wantannas, terutama ditambah dengan kehadiran Sesjen Wantannas yang baru, Mayjen TNI Doni Monardo, dimana pada 18 Mei 2018 ia mendapat pangkat setingkat lebih tinggi yaitu Letnan Jenderal TNI. Kenaikan pangkat tersebut bersamaan dengan 27 Perwira Tinggi (Pati) TNI lainnya di ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Doni Monardo dilantik oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Tidak lama setelah itu, sebagai rasa syukur, diadakan tasyakuran yang dipimpin langsung olehnya pada Selasa (22/05/2018) di bilangan Jakarta Pusat tepatnya di Hotel Grand Tulip I.

Acara tersebut bukan sekedar tasyakuran. Ada maksud lain dari Doni Monardo. Ia ingin menjadikan momentum di bulan suci itu sebagai media untuk mempererat tali silaturahmi diantara pegawai Setjen Wantannas. Memang terlihat klasik, namun besar maknanya.

Dalam acara tersebut, Doni Monardo berkesempatan menyampaikan pentingnya nilai-nilai yang diajarkan agama Islam bagi umat muslim. Satu diantaranya adalah menjaga kebersihan yang merupakan sebagian dari iman. Slogan ini banyak kita dapati di sekolah-sekolah atau di kantor. Namun, bukan hanya sekedar slogan. Pesan ini berfungsi sebagai pengingat kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberi perhatian amat besar pada kebersihan lingkungan. Beliau telah meletakkan pedoman dasar lingkungan dan kebersihannya. Hal itu pun diikuti oleh berbagai organisasi berskala nasional maupun dengan mengeluarkan deklarasi atau komitmen-komitmen kebersihan dan lingkungan. Contoh dari organisasi tersebut adalah Yayasan Budi, dimana Doni Monardo bertindak sebagai Pembina.

Masih dalam acara tasyakuran, Doni Monardo mengingatkan, sebagai umat muslim, jangan hanya mengaku beragama Islam saja. Namun juga harus mampu menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun mencontohkan, banyak sekali daerah di Indonesia dimana memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, akan tetapi tidak memperhatikan kebersihan lingkungannya, membuang sampah sembarangan, menumpuk sampah di pinggir jalan, juga sungai-sungainya kotor dan dibiarkan begitu saja.

Berperilaku kotor jelas tidak mencerminkan pesan "Kebersihan Sebagian dari Iman." Oleh sebab



Acara buka puasa bersama
Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo beserta Staf
di Hotel Grand Tulip I Jakarta

itu, Doni Monardo menyarankan agar para ulama dalam menyampaikan pentingnya kebersihan, menggunakan metode-metode sederhana dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Persoalan lain yang ikut disinggung Doni Monardo yaitu mengenai terorisme yang saat ini sedang marak terjadi di wilayah Indonesia. Upaya menolak gerakan terorisme dengan paham radikalismenya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga tertentu saja. Menurutnya, perlu adanya satu kesatuan komando yang saling bersinergi antar lembaga dan selanjutnya membentuk suatu kekuatan untuk menangkal gerakan-gerakan separatis maupun radikalisme yang bermaksud memecah belah dan menghancurkan NKRI.

Hal senada juga disampaikan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al Qur'an Fatimiyah di Bekasi KH. Dr. Mulyadi Efendi, MA yang hadir sebagai pengisi tausiah. Dikatakan olehnya, kemunculan paham-faham radikalisme dikarenakan banyak dari umat Islam dalam memahami Al-Qur'an tidak dengan dasar keilmuan yang benar. Hal ini berdampak pada bermunculannya penafsiran-penafsiran yang hanya sesuai dengan kemauan sendiri, sehingga timbul anggapan bahwa pola pikir merekalah yang paling benar, sementara yang lain salah.

Untuk menyikapi hal tersebut, Mulyadi bersama kawan-kawan di study Ilmu Al Qur'an Jakarta mengusulkan agar terjemahan Al-Qur'an versi Kementerian Agama yang ada sekarang sebaiknya direvisi, karena banyak terjemahan yang memunculkan radikalisme. Padahal, tafsiran sebenarnya bukanlah seperti itu.

Acara buka bersama keluarga besar Setjen Wantannas memang kerap dilakukan pada setiap bulan Ramadan. Banyak manfaat yang didapat daripada sekedar ramah tamah dan menikmati santapan berbuka puasa. Menjalin kekompakan dan mempererat silaturahmi, itulah manfaat yang sesungguhnya.****(dfn)

BIMTEK PERPRES 16/2018

UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG & JASA YANG LEBIH BAIK



Oleh: Enang Suhendar

Selasa, (8/05/2018) bertempat di Ruang Training dan Simulasi Lantai 5 Setjen Wantannas, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, diselenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk sosialisasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sebagai narasumber yaitu Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. Robin Asad Suryo dan Kepala Seksi Pelaksana Konstruksi LKPP Tri Santoso, ME.

Menurut Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Setjen Wantannas Letkol Chb. Asep Rudiantono, SE, MM, tujuan kegiatan ini untuk *update* pemahaman para pemangku kepentingan khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pengawas Internal, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Tim LPSE tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang ditetapkan sebagai peraturan baru untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Robin Asad Suryo dalam penjelasannya mengatakan, pengadaan pemerintah berperan penting dalam lajunya pembangunan nasional sekaligus pengembangan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan peraturan yang lebih komprehensif agar

dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Kecil Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Dr. Robin Asad Suryo menambahkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai struktur lebih sederhana, hanya mengatur hal yang normatif, menghilangkan bagian penjelasan, dan menerapkan praktek-praktek terbaik dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa (*best practice*).

Setidaknya terdapat 12 pengaturan yang baru meliputi tujuan pengadaan, munculnya pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, adanya agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, *swakelola*, *e-reverse auction*, pengecualian pengadaan, penelitian, *e-market place*, dan layanan penyelesaian sengketa.

Sementara itu, Tri Santoso, ME menyampaikan adanya perubahan istilah yaitu mengenai semula Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE berada pada unit kerja terpisah, sekarang disatukan menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Penggunaan nama lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, Sistem Gugur menjadi harga terendah, Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Total ada 19 perubahan peraturan diantaranya berubahnya tugas dari PPHP yang semula memeriksa hasil pekerjaan menjadi memeriksa administrasi pekerjaan. Demikian pula dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang tadinya diatur secara detail, sekarang tidak lagi, namun disesuaikan dengan *best practice*.

Sebagai penutup, kedua narasumber dari LKPP tersebut mengingatkan bahwa masa akhir penggunaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah 30 Juni 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan.****



MAYJEN TNI DONI MONARDO HADIRI PELUNCURAN BUKU KARYA PROF. DR. SALIM HAJI SAID

Sesjen Wantannas Mayjen TNI Doni Monardo beberapa waktu lalu menyambangi Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki, Jakarta untuk menghadiri peluncuran buku kritik sastra karya Salim Haji Said berjudul “Jangan Banyak Tanya, Ini Cuma Dongeng.” Buku ini merupakan sehimpunan esai yang mengulas tentang karya sastra pada akhir 1950-an hingga 2010-an dari sejumlah sastrawan Indonesia lintas generasi diantaranya Sori Siregar, Bur Rasuanto, Mansur Samin, Mohamad Rustandi Kartakusuma, Slamet Muljana, Pramoedya Ananta Toer, Asaham Alham Aidit, Seno Gumira Ajidarma, H.B. Jassin, K.H. Ahmad Mustofa Bisri, dan lain-lain.

Buku ini sekaligus dapat menjadi pintu masuk bagi pembaca awam dan para siswa di sekolah menengah untuk mengenal lebih jauh khazanah kekayaan yang tersimpan di ruang dalam sastra Indonesia. Salim Haji Said sehari-hari dikenal sebagai Guru Besar Ilmu Politik pada Universitas Pertahanan Indonesia dan pengajar tetap pada sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) serta Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK). Lahir di Desa Amparita, Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan, 10 November 1943.

Ia menuntaskan pendidikan tinggi di Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI,

1963–1965), Akademi Jurnalistik di Utrecht, Negeri Belanda (1969–1970), Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1963–1968), dan tamat dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia (1976). Meraih gelar MA bidang International Affairs (MAIA) dari Ohio University, Athens, Ohio, Amerika Serikat (1980) M.A. (1983) serta Ph.D. (1985) Ilmu Politik dari Ohio State University, Columbus, Ohio.

Dalam dunia kerja, Salim Haji Said cukup berpengalaman sebagai wartawan. Ia pernah bekerja sebagai redaktur harian *Pelopor Baru*, harian *Angkatan Bersenjata*, dan *Majalah Tempo* (1971–1987). Selain itu, Salim Haji Said pernah menjadi anggota Dewan Film Nasional (1989–2001) di samping Ketua Dewan Kesenian Jakarta (1990–1998), dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko (2006–2010).

Doni Monardo dan Salim Haji Said bak seorang sahabat. Salim Haji Said beberapa kali mendatangi kantor Setjen Wantannas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat untuk mengunjungi Doni Monardo. Tujuan kedatangannya selain bersilaturahmi, juga untuk memenuhi undangan Doni Monardo sebagai narasumber pada rapat yang membahas tentang bela negara dan tindak lanjut atas disahkannya Revisi Undang-Undang Terorisme.****(dfn)



MENGAPA PRESTASI OLAHRAGA INDONESIA CENDERUNG MENURUN?

Gelaran Asian Games 2018 yang akan berlangsung di dua kota Indonesia yakni Jakarta dan Palembang sudah di depan mata. Persiapan para atlet untuk ajang terbesar se-Asia tersebut tentu sudah berada di titik maksimal. Berbagai upaya dan cara tentunya telah dilakukan oleh pemerintah untuk kembali mendongkrak prestasi olahraga Indonesia yang akhir-akhir ini semakin menurun.

Pesta olah raga antar negara-negara di wilayah Asia Tenggara digelar sejak 1959, dan Indonesia mulai terlibat sejak SEA Games 1977 di Kuala Lumpur, dan Indonesia saat itu langsung juara umum. Dalam tiga ajang berikutnya (1979, 1981, 1983), Indonesia berturut-turut menjadi nomor satu, mengungguli Thailand yang dulunya sempat mendominasi. Kecuali kalah oleh Thailand di SEA Games 1985 (yang digelar di Bangkok) dan 1995 (di Chiang Mai), Indonesia kembali berjaya di ajang yang sama pada 1987, 1989, 1991, 1993 dan 1997.

Pada SEA Games di Palembang dan Jakarta 2011, Indonesia kembali berjaya, tetapi kemudian prestasinya terus merosot dan terakhir di SEA Games 2017 di Malaysia Indonesia hanya menempati peringkat kelima. Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami kemerosotan prestasi olahraga Indonesia semakin merosot dari semenjak era reformasi. Terutama dari segi pembinaan dari mulai pusat hingga ke daerah-daerah.

Pada era sebelum Reformasi, dukungan anggaran dari pemerintah untuk pembinaan sangat maksimal. Hal ini ditandai dengan seriusnya

pemerintah membentuk sekolah-sekolah olahraga yang tersebar di berbagai daerah. Seluruh dana dan kebutuhan para atlet betul-betul diperhatikan oleh pemerintah.

Di zaman Orde Baru, politik anggaran berbeda dengan saat ini. Pemerintah menetapkan angka anggaran sebesar sekian milyar rupiah, maka tidak ada satu pihak pun yang keberatan. Tak heran saat itu Sekolah Khusus Olahraga (SKO) yang berlokasi di Ragunan, Jakarta Selatan yang merupakan pusat dari sekolah olahraga di Indonesia mampu menelurkan banyak atlet-atlet berkualitas. Susi Susanti dari bulutangkis dan Wailan Walalangi, Yayuk Basuki, dan terkini Egy Maulana Vikri.

Namun yang terjadi sekarang, tidak ada dukungan anggaran yang signifikan. Lihat saja berbagai fasilitas dan sarana Olahraga Indonesia. Di SKO Ragunan, banyak sarana dan prasarana latihan atlet sudah tidak layak pakai, bangunan yang kusam, dan sederet kekurangan lainnya.

Dan, saat ini kita juga sering mendengar banyak atlet mengeluh saat mengikuti pelatnas karena dana uang saku yang tak kunjung cair karena birokrasi yang berbelit-belit. Bahkan banyak atlet pelatnas yang harus rela ikut turnamen Tarkam demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menafkahi anak istri selama uang saku dari pemerintah tak kunjung cair.

Namun kita tentunya berharap pada ajang Asian Games 2018 nanti Indonesia sebagai tuan rumah bisa berbicara banyak. Saat ini kitapun melihat keseriusan pemerintah untuk memperbaiki prestasi dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 735 miliar yang diberikan untuk peningkatan cabang olahraga Asian Games 2018.**** (yr)



MUSEUM LAYANG-LAYANG INDONESIA BERAWAL DARI HOBI, MENJADI PRESTASI

Barangkali masyarakat banyak yang belum tahu kalau Indonesia memiliki Museum Layang-Layang. Museum layang-layang satu-satunya ini yang terletak di kawasan Cilandak Jakarta Selatan ini didirikan pada 21 Maret 2003 oleh seorang pakar kecantikan yang menekuni dunia layang-layang sejak tahun 1985 dengan membentuk *Merindo Kites & Gallery* yang bergerak di bidang layang-layang. Namanya Endang Widjanarko Puspoyo, Istri mantan Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo.

Tujuan didirikannya Museum Layang-Layang adalah untuk melestarikan budaya layang-layang tradisional yang unik dari setiap wilayah Indonesia. Sebelum menjadi museum, bangunan yang kini dipakai untuk museum adalah sebuah *home industry* yang memproduksi layang-layang yang banyak di-ekspor ke luar negeri. Ternyata, tidak seperti museum lain yang berada di bawah dinas atau kementerian dan mendapat dana pengelolaan termasuk untuk menggaji karyawan, museum ini murni milik swasta dan dikelola oleh sebuah yayasan.

Museum ini telah mendapat pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak seperti penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk pemecahan rekor pemrakarsa dan penyelenggara pembuatan layang-layang berbentuk *diamond* terbesar pada 2011 serta

penghargaan kepariwisataan Indonesia pada 2004 yang diberikan oleh I Gede Ardika selaku Menteri Kebudayaan dan Pariwisata saat itu.

Menurut informasi dari pihak manajemen museum, dikatakan bahwa jumlah koleksi layang-layang di museum tersebut ada sebanyak 600 buah, namun jumlah tersebut terus bertambah seiring datangnya koleksi-koleksi baru dari para pelayang daerah dan luar negeri maupun layang-layang yang dibuat sendiri oleh karyawan museum termasuk layang-layang tradisional dan modern. Mulai dari layang-layang berukuran dua centimeter, hingga yang berukuran besar. Bahkan, dalam museum ini terdapat beberapa koleksi layang-layang berukuran raksasa terbesar di tanah air seperti layang-layang 'Megaray' berukuran 9 x 26 meter yang dapat disewakan untuk kegiatan eksibisi.

Fasilitas lain dari museum ini adalah ruang pemutaran audio visual, dimana pengunjung bisa menyaksikan pemutaran festival layang-layang di berbagai daerah serta teknik menerbangkan layang-layang, baik layang-layang kreasi, olahraga maupun layang-layang tradisional.

Selain itu, di kompleks museum juga terdapat ruang pameran batik, yang menampilkan batik-batik koleksi pribadi milik pendiri museum. Juga terdapat beberapa fasilitas lain seperti musala, kantin serta rumah budaya yang kerap menjadi tempat edukasi pembuatan layang-layang berbagai jenis.**** (dfn)



ARTI TANDA SETENGAH LINGKARAN DI KUKU ANDA

Oleh: Desi

Di dalam pengobatan tradisional Cina, area lunula jari kuku (bentuk setengah lingkaran di ujung kuku) dapat mengungkapkan kondisi kesehatan seseorang. Jika area lunula Anda terdapat noda merah, ada kemungkinan Anda sedang menderita penyakit kardiovaskular.

Jika area lunula Anda terlihat samar atau tidak terlihat sama sekali, hal ini bisa menjadi tanda penyakit anemia dan diabetes. Namun, sistem metabolisme yang lambat, dan jumlah racun yang banyak terdapat di dalam tubuh juga bisa menjadi penyebab samarnya bentuk lunula di jari kuku Anda.

Pengobatan tradisional Cina juga percaya, bahwa lunula dapat menunjukkan tingkat energi tubuh. Lunula akan terlihat sangat menonjol jika Anda memiliki energi yang baik, dan menjadi samar ketika tubuh Anda kekurangan energi dan nutrisi.

Manusia dengan tubuh sehat memiliki 8 hingga 10 lunula berwarna putih di kedua jari-jari tangan mereka. Jika dalam jari-jari hanya jempol yang memiliki lunula, artinya Anda memiliki energi fisik yang rendah dan termasuk orang yang mudah sakit. **** (sumber: Liputan6.com)

RESEP HIDANGAN LEBARAN

Hari Raya Idul Fitri selalu dirayakan oleh seluruh umat Islam sebagai hari kemenangan setelah selama 1 bulan menjalankan ibadah puasa. Ada berbagai cara yang dilakukan umat muslim di seluruh dunia untuk merayakan, salah satunya dengan menghadirkan makanan khas untuk seluruh keluarga dan handai taulan. Nah, Resep Kita kali ini menghadirkan 3 resep masakan tradisi Indonesia. Selamat mencoba...



KETUPAT

Bahan-bahan ketupat:

- Beras 1 kg (sesuai kebutuhan)
- Kulit ketupat (juga sesuai kebutuhan)

Cara Membuat:

- Rendam beras selama kurang lebih sekitar 30-40 menit agar beras menjadi mekar. Lalu isi kulit ketupat dengan beras yang sudah direndam sebanyak 3/4 dari besarnya kulit ketupat. Setelah air mendidih masukkan satu persatu ketupat yang telah diisi beras. tunggu hingga 1 ½ hingga 2 jam



RENDANG

Bahan-bahan Rendang:

- Daging sapi 1 kg (sesuai kebutuhan)
- Daun jeruk purut 4 lembar
- serai 2 batang
- Daun kunyit 2 lembar (diikat)
- Santan kental 1 liter, santan encer 1 liter

Bumbu:

- Cabai merah keriting 1 ons
- Kemiri 5 buah
- Jahe 2 cm
- Bawang merah 20 butir
- Bawang putih 10 siung
- Laos 3 cm
- Garam secukupnya

Cara Memasak:

- Langkah awal, rebus santan encer bersama bumbu-bumbu yang telah dihaluskan bersama batang serai, daun jeruk dan kunyit. aduk secara perlahan-lahan dan terus menerus hingga mendidih.
- Setelah itu masukkan daging sapi, aduk sesekali. Jika santan sudah mulai surut tambahkan santan kental sedikit demi sedikit. aduk terus dengan api kecil sampai kental dan keluar minyak.



OPOR AYAM

Bumbu:

- Bawang merah 3 butir
- Ketumbar 1 sendok teh
- Pala ½ sendok teh
- Bawang putih 2 siung
- Kunyit 2 cm
- Jahe 3 cm,
- Kemiri 5 butir (sangrai)
- Lengkuas 3 cm

Bahan-bahan Opor:

- ayam 1 ekor (sesuai kebutuhan)
- santan 200 ml
- daun salam secukupnya

Cara Memasak:

- panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga wangi sedap. masukkan santan, lalu aduk hingga rata. Beri garam, gula dan penyedap rasa secukupnya menurut selera jika suka.
- Kemudian masukkan daun salam, serai dan terakhir masukkan daging ayam yang sudah direbus tadi. aduk dan masak hingga daging matang dan empuk, angkat.

Sajikan semua masakan dengan kehangatan Idul Fitri...



RAPAT PEMBAHASAN SARASEHAN NASIONAL BERSAMA SESJEN WANTANNAS LETJEN TNI DONI MONARDO, K/L TERKAIT DAN TOKOH-TOKOH MALUKU



Majalah CATRA menerima artikel dan berita tentang suatu kegiatan atau apa saja. Panjang tulisan maksimal 500 kata, jenis huruf Arial, ukuran huruf 12, ukuran spasi 1,5 dan jenis kertas A4. Artikel dikirim dalam bentuk hard dan soft copy dengan format MS. Word ke alamat redaksi Majalah CATRA. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut tanpa mengurangi maksud dari isi tulisan. Artikel yang dimuat akan mendapat imbalan. Informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Bagian Humas Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas, Jalan Medan Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.

MARHABAH WA RAMADHAN



Letjen TNI Doni Monardo
Sesjen Wantannas

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1439 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN